

**AKUNTABILITAS KEUANGAN DALAM PENGGUNAAN
ANGGARAN PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN
KESEHATAN OLEH DINAS KESEHATAN KOTA
PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Negara**



Oleh :

**SRI PUSPITA SARI
07111001060**

Administrasi Keuangan Negara dan Fiskal

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOVEMBER 2017**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

**AKUNTABILITAS KEUANGAN DALAM PENGGUNAAN
ANGGARAN PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN
KESEHATAN OLEH DINAS KESEHATAN KOTA
PALEMBANG**

SKRIPSI

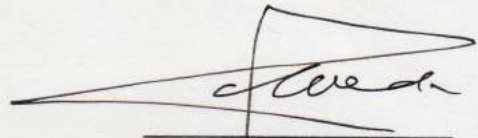
**Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada tanggal 13 November 2017
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat**

TIM PENGUJI SKRIPSI

Dr. Lili Erina, M.Si
Ketua



Drs. Joko Siswanto, M.Si
Anggota



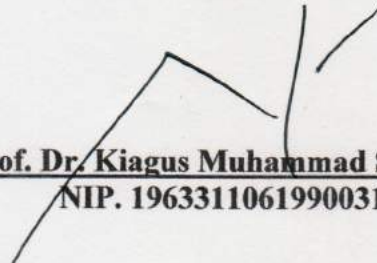
Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
Anggota



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., M.Si
Anggota



**Inderalaya, November 2017
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya
Dekan,**



Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 1963311061990031001

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**AKUNTABILITAS KEUANGAN DALAM PENGGUNAAN
ANGGARAN PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN
KESEHATAN OLEH DINAS KESEHATAN KOTA
PALEMBANG**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Negara**

Oleh :

**SRI PUSPITA SARI
07111001060**

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing, Oktober 2017

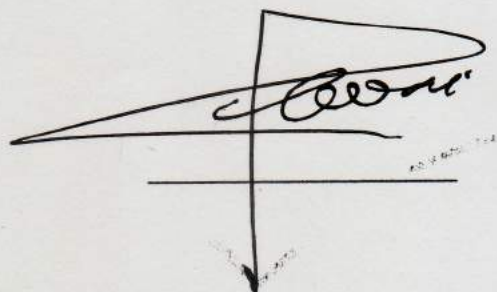
Pembimbing I

**Dr. Lili Erina, M.Si
NIP. 196612301992032001**



Pembimbing II

**Drs. Joko Siswanto, M.Si
NIP. 1957060519851003**



Motto & Persembahan

- ✓ *Berangkat dengan penuh keyakinan*
- ✓ *Berjalan dengan penuh keikhlasan*
- ✓ *Istiqomah dalam menghadapi cobaan*

“ YAKIN, IKHLAS, ISTIQOMAH “

(TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid)

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

- ❖ *Ayah dan Ibu sumber kebahagiaanku*
- ❖ *Saudara-saudaraku yang ku sayangi*
- ❖ *Sahabat-sahabatku yang telah memberi semangat*
- ❖ *Almamater kebanggaanmu*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Akuntabilitas Keuangan dalam Penggunaan Anggaran Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kota Palembang sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai derajat pendidikan strata satu (S1) jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari peran, bimbingan, bantuan, dukungan dan doa dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya atas didikan dan arahan selama menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya atas didikan dan arahan selama menempuh pendidikan di Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Dra. Martina, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara
5. Ibu Dr. Lili Erina, M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. Joko Siswanto, M.Si selaku Pembimbing II skripsi yang telah banyak membantu dan memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan, memberikan saran, nasehat serta masukan dengan penuh kesabaran untuk kelancaran skripsi.
6. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si dan Bapak Zailani Surya Marpaung, S. Sos., M.Si selaku dosen penguji ujian komprehensif yang telah memberikan saran, kritik dan bimbingan.
7. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu Dosen, serta segenap staf karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah mengajarkan ilmu dan pendidikan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan hingga menyelesaikan studi.
9. Kedua orang tua, Bapak Saffuan dan Ibu Sukarni tercinta yang selalu memberikan semangat dalam doa dan materi yang sungguh luar biasa, serta kakakku yang juga memberikan semangat dan dukungan.
10. Seluruh staf pegawai di Dinas Kesehatan Kota Palembang yang telah bersedia membantu penulis dalam pemberian data pada skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. Penulis dengan senang hati dan terbuka menerima kritik dan saran yang berguna bagi perbaikan di masa yang akan datang. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca. Atas perhatiannya penulis mengucapkan terimakasih.

Inderalaya, November 2017

Sri Puspita Sari

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Akuntabilitas Penggunaan Anggaran Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2015. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif, yang menggunakan metode kualitatif yaitu menjelaskan atau menggambarkan bagaimana Akuntabilitas Penggunaan Anggaran Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2015. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi, observasi dan wawancara mendalam. Akuntabilitas Penggunaan Anggaran Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Palembang ini dilihat berdasarkan konsep akuntabilitas menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang dikutip Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP, 2007) yang terdiri dari tiga unsur, yaitu Integritas Keuangan, Pengungkapan, dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas Penggunaan Anggaran pada Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan oleh Dinas Kesehatan secara keseluruhan sudah akuntabel, hal ini dilihat dari penggunaan anggaran tersebut telah memenuhi setiap komponen yang menjadi penilaian, hanya saja di dalam program tersebut perlu dimaksimalkan lagi tujuan dan pemanfaatan penggunaan anggaran, misalnya dana anggaran dalam program pengadaan obat dan perbekalan kesehatan perlu ditambah, jumlah sarana dan staff pengawasan diperbanyak, dan pengawasan terhadap obat yang beredar lebih diintensifkan lagi serta pada unsur pengungkapan yang dinilai kurang dalam penggunaan media publisitas dimana media adalah contoh bukti nyata kejujuran sebuah laporan keuangan.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Anggaran, Pengadaan Obat, Perbekalan Kesehatan

ABSTRACT

This study aimed at investigating the accountability of the use of budget on Procurement of Medicines and Medical Supplies by Health Department of Palembang in 2015. This was a descriptive study with qualitative method that explained and described the accountability of the use of budget on Procurement of Medicines and Medical Supplies by Health Department of Palembang in 2015. The data was obtained through a deep interview techniques, documentation and observation. This accountability of the use of budget on Procurement of Medicines and Medical Supplies was viewed based on the accountability concept by Public Administration Institute (LAN) quoted by Financial and Development Supervisory Agency (BPKP, 2007) that consists of three criterias namely Financial Integrity, Disclosure and Compliance with Laws and Regulations. The result of the study revealed that the accountability of the use and Medical Supplies of budget on Procurement of Medicine conducted by Health Department of Palembang had generally run well which could be seen from the use of budget that had fulfilled the criteria of assessment. However, the purpose and the the budget usage utilization of the program need to be maximized, the number of facilities and supervisory staff need to be added, and the monitoring of medicines circulation must be be intensified and to the component of disclosure that is considered less in the use of publicity media is an example of real evidence of honesty of a financial report.

Keywords: *Accountability, Budget, Procurement of Medicines, Medical Supplies*

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	8
1. Akuntabilitas	8
2. Konsep Akuntabilitas	12
3. Keuangan	20
B. Akuntabilitas Keuangan	21
C. konsep Akuntabilitas yang digunakan dalam Penelitian	21
D. Kerangka Berpikir	26
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	27
B. Definisi Konsep	27
C. Fokus Penelitian	28
D. Data dan Sumber Data	29
1. Data	29
2. Sumber Data	29
E. Informan Penelitian	30
F. Unit Analisis	30
G. Teknik Pengumpulan Data	30
H. Teknik Analisis Data	32
I. Sistematika Penulisan	32

BAB IV. GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kota Palembang	34
1. Kedudukan Dinas Kesehatan Kota Palembang	35
2. Visi dan Misi	35
3. Tujuan, Strategi, dan Saran	38
4. Struktur Organisasi	41
5. Struktur Jabatan	41
6. Tugas Pokok dan Fungsi	42

BAB V ANALISIS DAN INTREPRETASI DATA

A. Analisis Akuntabilitas Keuangan dalam Penggunaan Anggaran Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2015.....	45
1. Analisis Integritas dalam Penggunaan Anggaran Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2015.....	46
a. Analisis Mengenai Laporan yang Disajikan Secara Jujur dalam Penggunaan Anggaran Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2015.....	47
b. Analisis Mengenai Tercapainya Tujuan Penggunaan Dana dalam Penggunaan Anggaran Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2015.....	52
c. Analisis Mengenai Akurasi Laporan Keuangan yang Sesuai dengan Standar Akuntansi dan Pelaporan dalam Penggunaan Anggaran Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2015.....	56
2. Analisis Pengungkapan dalam Penggunaan Anggaran Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan oleh Dinas Kesehatan Koota Palembang Tahun 2015.....	64
a. Analisis Mengenai Pengungkapan Laporan Keuangan dalam Penggunaan Anggaran Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun.....	65
b. Analisis Mengenai Laporan Dapat Diverifikasi Kebenarannya dalam Penggunaan Anggaran Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Oleh Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2015.....	72
c. Analisis Mengenai Penggunaan Aplikasi SIMDA Keuangan dalam Penggunaan Anggaran Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2015.....	80
3. Analisis Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam Penggunaan Anggaran Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2015.....	89
a. Analisis Mengenai Pemanfaatan Dana yang Sesuai dengan Ketentuan dalam Penggunaan Anggaran Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	

oleh Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2015.....	90
b. Analisis Mengenai Laporan Keuangan Sesuai dengan Aturan dalam Penggunaan Anggaran Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2015	92
B. Hasil Analisis dan Intrepetasi Data Akuntabilitas Keuangan dalam Penggunaan Anggaran Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2015.....	95

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	98
B. Saran	98
1. Saran Teoritis	98
2. Saran Praktis	99
DAFTAR PUSTAKA	101

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Kebutuhan Obat tiap wilayah Sumatera Selatan Tahun 2015	2
2. Perkiraan Kebutuhan Obat Tahun 2015	4
3. Perbandingan jumlah Kebutuhan dan Ketersediaan Obat Tahun 2015	5
4. Jumlah anggaran program obat dan perbekalan kesehatan tahun 2013-2015	6
5. Data Anggaran obat dan Perbekalan Kesehatan	24
6. Lembar Kegiatan Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	48
7. Hasil Kegiatan Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	53
8. Laporan Realisas Anggaran.....	60
9. Neraca	61
10. Laporan Realisasi Anggaran	67
11. Neraca	68
12. Hasil Audit Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kota Palembang	78
13. Penggunaan Aplikasi SIMDA	84
14. Hasil Analisis dan Interpretasi data Akuntabilitas Keuangan dalam Penggunaan Anggaran Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Oleh Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2015	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pemikiran	26
2. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Palembang	41
3. Website Dinas Kesehatan Kota Palembang.....	50
4. Temuan Obat Rusak dan Kadaluarsa	54
5. Hubungan antara Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Akuntansi Pemerintahan	58
6. Penyuluhan dan Pendidikan kepada Staff Keuangan Dinas Kesehatan Kota Palembang	62
7. Siklus Akuntansi Keuangan Daerah	69
8. Website Dinas Kesehatan Kota Palembang	70
9. Bagan Teknis Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	74
10. Proses Pemeriksaan Laporan Keuangan.....	75
11. Aplikasi SIMDA Keuangan Dinas Kesehatan Kota Palembang	83
12. Tahapan Implementasi SIMDA Keuangan	85
13. <i>Print Out</i> Neraca Keuangan	88
14. Pedoman Dinas Kesehatan Kota Palembang Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015	91
15. Pedoman Laporan Keuangan di Dinas Kesehatan Kota Palembang	94

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

Audit	: Penilaian
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPKD	: Badan Pemeriksa Keuangan Daerah
BPKP	: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
<i>Business Process</i>	: Proses Bisnis
CaLK	: Catatan atas Laporan Keuangan
<i>Client</i>	: Jaringan
Dinkes	: Dinas Kesehatan
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
<i>Disclaimer</i>	: Penyangkalan
DPA	: Daftar Pelaksanaan Anggaran
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
<i>Event</i>	: Kejadian
<i>Fact</i>	: Fakta
<i>Good Governance</i>	: Pemerintahan yang Baik
<i>Guidline</i>	: Pengawas
LAN	: Lembaga Administrasi Negara
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
LAK	: Laporan Arus Kas
LKPD	: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LKPP	: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
MPR	: Majelis Permusyawaratan Daerah
Permendagri	: Peraturan Pemerintah Dalam Negeri
<i>Pervasive</i>	: Secara Keseluruhan
PP	: Peraturan Pemerintah
<i>Public Finance</i>	: Keuangan Negara
Pusdiklatwas	: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan
<i>Reasonable Assurance</i>	: Keyakinan yang Memadai

RKA	: Rencana Kerja Anggaran
SAP	: Standar Akuntansi Pemerintah
SAPP	: Standar Akuntansi Pemerintah Pusat
SAPD	: Standar Akuntansi Pemerintah Daerah
<i>Server</i>	: Jaringan
SIMDA	: Sistem Informasi Manajemen Daerah
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKPKD	: Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
SPD	: Surat Penyediaan Dana
SPIP	: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
SPM	: Surat Perintah Membayar
SPP	: Surat Perintah Pembayaran
SP2D	: Surat Perintah Pencairan Dana
<i>Transfer of Knowlegde</i>	: Penyaluran Pengetahuan
WTP	: Wajar Tanpa Pengecualian

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Penunjukkan Pembimbing Skripsi	35
2. Kartu Bimbingan Skripsi	36
3. Surat Perubahan Judul	37
4. Surat Izin Penelitian FISIP Unsri	38
5. Surat Izin Penelitian dari Kesbangpol	39
6. Surat Izin Penelitian dari Dinas Kesehatan Kota Palembang	40
7. Pedoman Wawancara dan Observasi	41
8. Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia sejauh ini adalah tentang menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga publik, baik pusat maupun daerah. Mardiasmo (2006: 24) menyatakan bahwa akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atas kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Dalam pelaksanaan Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003 yang menjadi salah satu hal yang mendasar adalah bahwa sistem keuangan Negara (*public finance*) menyangkut sejumlah uang yang harus dikelola di bawah mandat rakyat. Uang negara adalah uang rakyat, *public money is public consent*. Setiap rupiah uang negara diperoleh dari hasil kerja rakyat yang berasal dari berbagai macam pajak, retribusi, denda, penjualan asset hingga berbagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah.

Akuntabilitas keuangan merupakan bagian penting dalam akuntabilitas publik, LAN dan BPKP (2007: 28) menyatakan bahwa Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran dalam akuntabilitas keuangan adalah laporan keuangan yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran instansi pemerintah.

Penilaian (audit) diperlukan untuk mengetahui akuntabilitas suatu laporan keuangan, pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan dalam rangka memberikan pendapat opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Akuntabilitas penggunaan anggaran di dalam sebuah instansi pemerintah sangat penting dilakukan baik

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah karena untuk menilai pemerintahan yang baik atau *good governance* dari instansi pemerintah tersebut. Akuntabilitas publik menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat sesungguhnya. Dengan demikian akuntabilitas terkait dengan falsafah bahwa lembaga eksekutif pemerintah yang tugas utamanya adalah melayani rakyat serta bertanggung jawab secara langsung maupun tidak langsung kepada rakyat.

Kota Palembang sebagai wilayah dengan penduduk terbanyak dari wilayah Sumatera Selatan, dimana memiliki penduduk mencapai 1.535.900 orang memiliki riwayat kebutuhan obat yang cenderung lebih besar dibandingkan wilayah lainnya. Berdasarkan hal tersebut anggaran dalam pengadaan obat harus bisa dimanfaatkan dan dikelola sebaik mungkin guna menjamin ketersediaan obat untuk masyarakat itu sendiri.

Tabel 1 Kebutuhan Obat tiap Wilayah Sumatera Selatan Tahun 2015

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Kebutuhan obat
1	OKU	340.000 orang	289 jenis obat
2	OKI	768.900 orang	492 jenis obat
3	Muara Enim	755.800 orang	456 jenis obat
4	Lahat	384.600 orang	317 jenis obat
5	Musi Rawas	551.500 orang	358 jenis obat
6	Musi Banyuasin	592.400 orang	387 jenis obat
7	Banyuasin	788.300 orang	467 jenis obat
8	OKU Selatan	334.700 orang	265 jenis obat
9	OKU Timur	634.700 orang	403 jenis obat
10	Ogan Ilir	398.300 orang	327 jenis obat
11	Empat Lawang	231.700 orang	246 jenis obat
12	Pali	-	-
13	Musi Rawas Utara	-	-
14	Palembang	1.535.900 orang	689 jenis obat
15	Prabumulih	171.800 orang	176 jenis obat
16	Pagar Alam	131.100 orang	134 jenis obat
17	Lubuk Linggau	213.000 orang	216 jenis obat

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Palembang

Kewajiban pemerintah dalam memastikan ketersediaan obat untuk masyarakat kota Palembang dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan kota Palembang mengharuskan dapat melaksanakan proses pengadaan obat dengan sebaik mungkin. Salah satu bagian dari pelaksanaan proses pengadaan tersebut adalah dengan memanfaatkan anggaran yang telah disediakan dan dituntut dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi jaminan kesehatan serta untuk mencegah penyalahgunaan pelayanan kesehatan.

Dinas Kesehatan kota Palembang merupakan salah satu bentuk pelayanan birokrasi dalam bidang publik yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan. Salah satu program Dinas Kesehatan kota Palembang adalah pengadaan obat dan perbekalan kesehatan. Akses terhadap obat terutama obat esensial merupakan salah satu hak masyarakat dalam penjaminan pelayanan kesehatan dalam hal ketersediaan obat yang berarti dalam penyediaan obat merupakan kewajiban bagi pemerintah dan lembaga pelayanan kesehatan baik publik maupun swasta.

Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang jenis, jumlah dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Dinas Kesehatan kota Palembang bersumber pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal 36 tentang Kesehatan dimana pemerintah menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat.

Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan tentunya membutuhkan anggaran yang bersumber dari APBD. Pengelolaan anggaran yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan kota Palembang tersebut harus dikelola secara profesional, akuntabel dan transparan akan tetapi dalam pelaksanaan penggunaan anggaran

pengadaan obat dan perbekalan kesehatan tersebut masih banyak permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut yang diantaranya :

1. Data kebutuhan obat setiap wilayah di kota Palembang selalu berubah

Perubahan jumlah masyarakat yang mengalami sakit di setiap wilayah kota Palembang mengakibatkan pula perubahan jumlah kebutuhan obat di tengah masyarakat dimana data yang sudah dikumpulkan dan disesuaikan sebelumnya dengan pasokan obat sudah dianggap tidak relevan. Pada tahun 2015 Dinas Kesehatan melakukan perhitungan perkiraan kebutuhan obat (3 diantara obat yang paling sering digunakan oleh masyarakat) yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2 Perkiraan Kebutuhan Obat Tahun 2015

No.	Nama Obat	Perkiraan Kebutuhan	Penggunaan
1.	Paracetamol	3.750 kaleng/botol@1000 tablet	4.200 kaleng/botol@1000 tablet
2.	Oralit	64.800 bungkus@1000ml/1 liter	270.000 bungkus@1000ml/1 liter
3.	Tetrasiklin	8.750 kapsul/1000tablet	11.500 kapsul/1000tablet

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Palembang

Berdasarkan 3 obat pada tabel diatas terjadi perbedaan signifikan antara perhitungan kebutuhan obat oleh pihak Dinas Kesehatan kota Palembang dengan jumlah kebutuhan di masyarakat, maka seharusnya Dinas Kesehatan kota Palembang lebih mengakurasi dalam pengumpulan dan pengolahan data jumlah kebutuhan obat dan masyarakat penderita.

2. Adanya beberapa jenis obat yang terkadang tidak tersedia

Berbedanya jumlah kebutuhan akan jenis obat tertentu pada setiap wilayah kota Palembang menuntut pihak penyedia seharusnya bisa lebih profesional dalam menjamin ketersediaan dalam pemesanan namun pada kenyataannya ada beberapa jenis obat yang terkadang tidak tersedia dan terkadang sulit didapat pada daftar penyedia yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3 : Perbandingan Jumlah Kebutuhan dan ketersediaan obat

No.	Nama Obat	Jumlah Kebutuhan	Ketersediaan
1.	Boraxgliserin	7.000 botol	5.600 botol
2.	Asetosal	10.300 kotak	9.850 kotak

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Palembang

3. Masih kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan kota Palembang dalam proses pemantauan status pesanan sehingga pengiriman obat yang dilakukan kurang efisien

Pencapaian suatu tujuan program organisasi fungsi pengawasan sangat dibutuhkan, pengawasan yang baik akan dapat mencegah timbulnya penyimpangan dan menjamin kinerja pelaksanaan program sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Siagan (1982:135) menyatakan bahwa proses pengawasan berpengaruh besar dalam pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu dalam hal ini penulis melihat bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan kota Palembang dalam ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan terhambat karena kurangnya koordinasi dalam proses pemantauan status pesanan yang terjadi karena tidak memperhatikan hal-hal berikut ini :

1. Nama obat
2. Satuan kemasan
3. Jumlah obat yang diadakan
4. Obat yang sudah diterima
5. Obat yang belum diterima

Jika dilihat dari tujuan pemanfaatan penggunaan anggaran, anggaran tersebut belum digunakan secara profesional dan belum tercapainya tujuan dari penggunaan anggaran itu sendiri dimana jika dilihat dari jumlah anggaran yang meningkat setiap tahun seharusnya

dalam realisasi sudah sesuai dengan tujuan yaitu menjamin sepenuhnya ketersediaan obat dalam masyarakat.

Tabel 4 Jumlah anggaran program obat dan perbekalan kesehatan tahun 2013-2015

Tahun	Jumlah Anggaran
2013	Rp 48.781.000,00
2014	Rp 51.820.400,00
2015	Rp 56.930.700,00

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Palembang

Berdasarkan kesenjangan yang muncul berkaitan antara ketersediaan obat dengan jumlah anggaran yang telah disediakan maka perlu diteliti lebih lanjut tentang akuntabilitas keuangan yang dalam hal ini yaitu penggunaan anggaran pengadaan obat dan perbekalan kesehatan oleh Dinas Kesehatan kota Palembang tahun 2015. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pertanggungjawaban yang tepat mengenai akuntabilitas keuangan dalam pengadaan obat dan perbekalan kesehatan oleh Dinas Kesehatan kota Palembang tahun 2015.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka rumusan masalah yang perlu dikaji pada penelitian ini adalah : “Bagaimana Akuntabilitas Keuangan dalam Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan oleh Dinas Kesehatan kota Palembang tahun 2015?”.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran akuntabilitas keuangan dalam pengadaan obat dan perbekalan kesehatan oleh Dinas Kesehatan kota Palembang tahun 2015.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi perkembangan Ilmu Administrasi Negara, terutama berkaitan dengan Keuangan Negara khususnya mengenai akuntabilitas keuangan dalam pengadaan obat dan perbekalan kesehatan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberi kontribusi atau sumbangan pemikiran bagi pihak Dinas Kesehatan kota Palembang khususnya pegawai yang berkepentingan dalam upaya meningkatkan kinerja agar akuntabilitas keuangan dalam pengadaan obat dan perbekalan kesehatan dimasa yang akan datang dapat dilaksanakan dengan lebih bertanggungjawab untuk digunakan dengan efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Budiardjo, Miriam (1998). *Menggapai Kedaulatan Rakyat*. Bandung : Mizan.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Kumorotomo, Wahyudi 2005. *Akuntansi Birokrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Krina, P. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Lionardo, Andries (2011). *Administrasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Tunggal Mandiri
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Edisi Kedua, UPPSTIM YKPN, Yogyakarta.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Pusdiklatwas. BPKP. 2007. *Modul Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. Jakarta: Edisi Kelima
- Rasul, S. 2003. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU NO. 17/2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta: PNR
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Suparmoko. 2011. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: BPF
- Ulum, I. 2009. *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Bumi Aksara

Peraturan

- Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2007 tentang Pengendalian Bahan Obat, Obat Spesifik dan Alat Kesehatan*. 2014. hukumonline.com
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengadaan Obat berdasarkan Katalog Elektronik*. 2014. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta

*Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.*2009. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta

*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dukungan Obat dan Perbekalan Kesehatan.*2014. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2003. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta

*Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*2004. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta

Internet :

LAN-BPKP. 2007. *Akuntabilitas dan Good Governance*, (Online), (<http://kms.ipb.ac.id/>), diakses 08 Januari pukul 10. 15 WIB).

Mardiasmo. 2006. *Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*,*Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, (Online), vol 2, no.1, (<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/>) diakses 14 Januari pukul 20.30 WIB).

Pusdiklatwas-BPKP. 2011. *Akuntabilitas Instansi Pemerintah*, (Online), (<http://pusdiklatwas.bpkp.go.id/>), diakses 18 Januari pukul 17.17 WIB)